

Analisis Konflik dan Resolusinya pada Perpecahan Etnis Porodisa di Kota Salatiga

Silvani Agnes Bawoel¹, Elly Esra Kudubun², Royke Roberth Siahainenia³

Universitas Kristen Satya Wacana

agnessilvani@gmail.com¹, elly.kudubun@uksw.edu², royke.roberth@uksw.edu³

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konflik dan proses resolusi yang terjadi dalam perpecahan etnis Porodisa di Kota Salatiga, yang melahirkan organisasi baru bernama PERSADA. Konflik yang terjadi dipicu oleh kontroversi terkait perubahan identitas organisasi, seperti penggantian nama, logo, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tanpa melibatkan seluruh anggota. Meskipun Porodisa awalnya berfungsi sebagai wadah kebersamaan bagi mahasiswa asal Talaud, ketidakpuasan yang muncul akibat keputusan sepihak menyebabkan terjadinya perpecahan. Melalui metode kualitatif yang mengandalkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis dilakukan berdasarkan Teori Segitiga Konflik Johan Galtung yang memberikan pemahaman tentang interaksi antara sikap, perilaku, dan kontradiksi, dapat membantu dalam merumuskan strategi resolusi konflik yang lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Porodisa dan PERSADA kini beroperasi sebagai entitas terpisah, terdapat niat yang kuat dari kedua belah pihak untuk membangun kembali hubungan yang harmonis. Proses resolusi konflik dianjurkan melalui dialog terbuka dan mediasi oleh pihak ketiga yang netral, mencerminkan pendekatan *peacemaking* Galtung, guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan konstruktif. Dengan penekanan pada komunikasi yang transparan dan partisipasi semua anggota dalam pengambilan keputusan, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan keharmonisan di dalam organisasi sangat bergantung pada keterlibatan serta kepekaan terhadap kebutuhan bersama. Hal ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan memastikan keberlangsungan kelompok di masa depan.

Kata Kunci: Konflik, Porodisa, PERSADA, Resolusi Konflik

ABSTRACT

This study analyzes the conflict and resolution processes that occurred in the ethnic division of Porodisa in Salatiga City, leading to the establishment of a new organization called PERSADA. This conflict was triggered by controversies surrounding changes to the organization's identity, such as the alteration of the name, logo, and Articles of Association (AD/ART) without involving all members. Although Porodisa initially served as a gathering place for students from Talaud, dissatisfaction arising from unilateral decisions led to division. Utilizing a qualitative method based on interviews, observations, and documentation, the analysis is conducted through Johan Galtung's Conflict Triangle Theory, which provides insight into the interactions between attitudes, behaviors, and contradictions and can help formulate more effective conflict resolution strategies. The findings indicate that, despite Porodisa and PERSADA now operating as separate entities, there is a strong desire from both sides to rebuild harmonious relationships. The conflict resolution process is recommended through open dialogue and mediation by neutral third parties, reflecting Galtung's peacemaking approach to create an inclusive and constructive environment. Emphasizing transparent communication and the participation of all members in decision-making, this research underscores that the sustainability and harmony within the organization are significantly dependent on involvement and sensitivity to shared needs. This is expected to strengthen solidarity and ensure the group's longevity in the future.

Keywords: Conflict, Porodisa, PERSADA, Conflict Resolution.

1. PENDAHULUAN

Konflik merupakan fenomena yang kerap kali ditemui di berbagai lapisan masyarakat. Istilah “Konflik” secara etimologi berasal dari bahasa latin “*con*” yang berarti Bersama serta “*fligere*” yang berarti benturan ataupun tabrakan (Setiadi, 2018). Konflik dalam sosiologis diartikan sebagai suatu “proses sosial” dimana individu ataupun kelompok orang berupaya menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya (Burlian, 2015). Teori Konflik menurut Karl Marx berfokus pada pertentangan antara kelas-

kelas dalam masyarakat. Marx melahirkan pemikirannya dengan memperhatikan pola kehidupan masyarakat waktu itu yang memunculkan ketimpangan sosial amat tajam. Marx berpandangan bahwasanya para pemilik modal (Borjuis) memiliki dominasi yang sangat besar dalam sistem sosial ekonomi, sehingga para pemilik modal dengan mudah dapat mengontrol maupun menguasai kelompok sosial lain yang memiliki modal sosial lemah atau bahkan tidak memiliki modal (Proletar) dalam meraih tujuannya. Dalam prosesnya, kedua kelas ini berdialektika, kelas proletar sebagai kelas yang mengalami penindasan, menyadari perlu adanya perbaikan nasib. Kesadaran ini kemudian memunculkan kesadaran kolektif. hingga berujung terjadinya konflik dan revolusi sosial (Manarta et al., 2024).

Lewis A. Coser juga memberikan pandangannya mengenai konflik yang dikenal dengan teori fungsionalisme konflik sosial, Coser lebih fokus/memusatkan perhatiannya terhadap fungsi-fungsi dari konflik. Ia berpendapat bahwa dari adanya konflik tidak selalu terjerumus atau berakhir pada suatu tindakan fisik yang berupa kekerasan, peperangan, kerusakan dan lain sejenisnya. Akan tetapi dari adanya konflik tersebut nantinya akan menimbulkan hal positif pula yakni adanya kesepakatan-kesepakatan baru yang dapat diterapkan, solidaritas semakin tinggi, dan semakin menjadi sarana perekat sosial. Analisa Coser tentang fungsi dari konflik sosial bisa juga dipandang sebagai suatu jalan pintas ataupun solusi terhadap perspektif-perspektif teori konflik yang sifatnya radikal yang diusung dalam pandangan Marxis. Lewis A. Coser berpendapat bahwa ada fungsi sosial dalam suatu konflik (Azisi, 2021).

Selain Coser, terdapat pula Ralf Dahrendorf yang merupakan kritikus fungsionalisme struktural, karena menurutnya telah gagal memahami masalah perubahan. Sebagai landasan teorinya Dahrendorf melakukan revisi dari gagasan Karl Marx yaitu mengenai revolusi kelas. Perjuangan kelas yang dibahas Dahrendorf lebih berdasarkan kekuasaan daripada kepemilikan sarana-sarana produksi. Jika Marx bersandar pada pemilikan alat produksi, maka Dahrendorf bersandar pada kontrol atas alat produksi.

Selain Marxisme, Dahrendorf juga mengembangkan beberapa terminologi dari Max Weber, antara lain bahwa sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif melalui otoritas/kekuasaan. Dalam pandangan Dahrendorf mengenai konflik, ia dalam melihat masyarakat terbagi ke dalam dua rupa, pertama yaitu konflik, kedua yakni kesepakatan atau konsensus (*consensus*). Dahrendorf berpendapat bahwa, dalam suatu masyarakat tidak akan terjadi konflik jika sebelumnya tidak ada konsensus.. Disini terlihat bahwa Dahrendorf dengan teorinya berusaha menyempurnakan pendapat Marx dan Weber mengenai realitas sosial, dimana konflik yang tercipta itu disebabkan karena kepentingan yang saling bertentangan dalam struktur sosial. Kepentingan yang saling bertentangan itu merupakan refleksi dari

perbedaan dalam distribusi kekuasaan antar kelompok yang superordinat yang memiliki otoritas (mendominasi) dengan kelompok subordinat (terdominasi). Inilah tesis sentral Dahrendorf terkait realitas sosial (Yogi, 2020).

Teori konflik ini memberikan perspektif yang berbeda-beda dan saling melengkapi dalam memahami dinamika sosial. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah perpecahan yang terjadi pada Paguyuban Porodisa, sebuah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa asal Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, yang berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Paguyuban sendiri berasal dari kata "guyub" dalam bahasa Jawa, yang artinya "bersama-sama" atau "kumpul" (Widiyanto & Pum, 1999). Maka dari itu, Porodisa dapat diartikan sebagai perkumpulan Paguyuban etnis yang anggotanya berdasarkan profesi (mahasiswa), secara jelas memperlihatkan identitasnya sebagai suatu paguyuban kedaerahan karena anggotanya adalah orang-orang yang berasal dari daerah Talaud. Dengan demikian paguyuban-paguyuban yang ada di perantauan seringkali mengidentitaskan dirinya berasal dari suatu daerah tertentu maupun etnis tertentu.

Sejak didirikan, Porodisa telah berfungsi sebagai tempat berkumpul dan memberikan dukungan sosial bagi anggotanya. Namun, konflik internal muncul pada tahun 2019 akibat adanya rencana perubahan nama, logo, dan AD-ART yang dipandang oleh sebagian anggota bertentangan dengan nilai-nilai dasar paguyuban tersebut. Konflik menyebabkan perpecahan hingga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Porodisa dan PERSADA. Ketegangan ini masih terus berlanjut dan menciptakan jurang yang lebih dalam antara keduanya.

Dalam sejumlah penelitian sebelumnya, berbagai konflik di masyarakat telah diidentifikasi, termasuk konflik antara warga, pemerintah desa dan perusahaan tambang pasir di Dusun Sungai, penelitian ini dilakukan oleh Samak Irwandi & Endah, (2017). Hasil penelitian menunjukkan konflik disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah desa terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan, serta terdapat perbedaan kepentingan antara pihak yang terlibat dalam konflik, namun resolusi konflik dapat dicapai melalui konsiliasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Penelitian selanjutnya oleh Zattullah, (2021). Konflik antara Sunni dan Syiah di Sampang yang muncul dari perbedaan kepercayaan, prasangka negatif, sifat sombong dan eksklusif dari pengikut Sunni terhadap pengikut Syiah, yang menyebabkan mereka semakin resisten terhadap kelompok Syiah. Upaya mengatasi konflik harus dilakukan secara paralel dengan titik berat pada penanganan terhadap prasangka dan sikap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Selain itu, penelitian oleh Joni et al., (2023) menemukan konflik di Gereja Beth-El Tabernakel Tariwan, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan teologi dan kepemimpinan, serta

mencatat pentingnya dialog dan mediasi untuk meredakan ketegangan dalam komunitas gereja. Ketiga penelitian ini menunjukkan hasil analisis konflik yang baik menjadi kunci tercapainya resolusi konflik yang tepat.

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai dinamika konflik dan proses resolusinya dalam konteks perpecahan etnis Porodisa di Kota Salatiga. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada dua aspek utama, yaitu pemahaman mengenai penyebab munculnya konflik dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya. Sementara banyak studi sebelumnya lebih banyak meneliti konflik sosial dalam skala yang lebih luas, seperti konflik antara kelompok masyarakat dan pemerintah atau antar-agama, penelitian ini berupaya untuk menggali konflik yang terjadi dalam komunitas etnis yang lebih kecil dan spesifik. Gap penelitian yang teridentifikasi adalah minimnya kajian yang menerapkan teori segitiga konflik Johan Galtung dalam konteks perpecahan etnis di suatu paguyuban. Hal ini menjadi penting untuk dipelajari karena konflik yang terjadi dalam komunitas etnis seringkali dipengaruhi oleh faktor identitas, kebudayaan, dan hubungan interpersonal yang lebih mendalam. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian konflik yang lebih efektif melalui analisis terhadap sikap, perilaku, dan kontradiksi yang ada dalam dinamika sosial Paguyuban Porodisa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami kondisi suatu fenomena atau gejala dengan pendeskripsian secara mendalam tentang kondisi tersebut yang alami (natural setting) mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (Nugrahani & Hum, 2014). Dalam analisis konflik Porodisa, penulis mengadopsi Teori Segitiga Konflik (Segitiga ABC) yang dikembangkan oleh Johan Galtung. Terdapat tiga komponen utama dalam segitiga konflik Galtung yang terdiri dari ABC, yang artinya A (*attitude/sikap*), B (*behavior/perilaku*), dan C (*Contradiction/ kontradiksi*). Kontradiksi (C): Merujuk pada masalah atau kepentingan yang bertentangan antara pihak-pihak yang berkonflik; Sikap (A): Mencakup persepsi, prasangka, dan sikap emosional masing-masing pihak terhadap satu sama lain; Perilaku (B): Berkaitan dengan tindakan nyata yang diambil oleh pihak-pihak dalam konflik (Susan, 2014). Dengan memahami dimensi-dimensi ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik sehingga bisa membantu dalam merumuskan strategi resolusi konflik yang lebih efektif.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dan pengumpulan dokumen terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pengklasifikasian data yang telah terkumpul, di mana penulis memilih data yang relevan untuk mendukung penelitian dan mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Tahap kedua adalah penyajian data, penulis menyusun data yang ada secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, sehingga data yang disajikan dalam penelitian ini menjadi terstruktur dan fokus dalam analisisnya. Akhirnya, tahap ketiga adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, di mana penulis memverifikasi dan menarik kesimpulan berdasarkan data dan narasi yang telah disusun (Miles et al., 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Awal Porodisa Sebelum Konflik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan J.L yang merupakan salah satu pendiri Paguyuban Porodisa, kondisi awal sebelum konflik menunjukkan Porodisa sebagai paguyuban mahasiswa asal Kabupaten Talaud, senantiasa menghadirkan semangat kebersamaan yang kuat di antara anggotanya. Namun sebelum terbentuknya Porodisa, mahasiswa asal Talaud yang menempuh pendidikan di Kota Salatiga terhimpun dalam satu organisasi etnis Sangihe yang dikenal sebagai Liung Kendage. Dalam berbagai kegiatan, seperti pawai seni dan budaya Indonesia yang diadakan oleh Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), mereka aktif menampilkan kebudayaan etnis Sangihe meskipun bukan berasal dari budaya mereka sendiri.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012, jumlah mahasiswa Talaud di UKSW semakin meningkat. Mereka merasakan pentingnya memiliki organisasi sendiri yang dapat merepresentasikan identitas etnis mereka. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, beberapa mahasiswa kemudian mengadakan diskusi dengan Bupati Talaud yang saat itu berada di Yogyakarta. Respons positif dari Bupati memotivasi langkah mereka, sehingga pada tahun 2013 beberapa dosen turut membantu dengan cara mengundang Bupati kabupaten Talaud dalam seminar yang diadakan oleh fakultas hukum UKSW sekaligus meresmikan Porodisa sebagai paguyuban mahasiswa etnis Talaud di Salatiga, disertai dengan pelantikan Badan Pengurus Harian (BPH) Porodisa.

Dalam perjalanannya, Porodisa berfungsi sebagai rumah dan simbol kerukunan serta gotong royong di kalangan mahasiswa Talaud yang kuliah di kota Salatiga.

Dalam suasana yang harmonis, anggota Porodisa aktif dalam berbagai kegiatan, baik di bidang budaya maupun olahraga. Dua kegiatan utama yang diadakan di kampus ialah

Indonesian International Culture Festival (IICF) dan Celebes. Kegiatan tersebut memungkinkan mereka untuk menampilkan kebudayaan lokal khas Talaud. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut menciptakan kesempatan bagi anggota untuk bersosialisasi dan membangun jaringan dengan mahasiswa dari latar belakang yang berbeda. Seperti pernyataan salah satu anggota Porodisa, D.M:

“Saya bergabung dengan Porodisa di tahun 2017, berawal dari ikut ibadah etnis dari situ kedekatan kami terbangun. Kalau ada kegiatan kampus seperti IICF kami sangat senang. kami menampilkan tarian adat Talaud, lagu daerah dan menyediakan makanan khas daerah Talaud. Dengan adanya Porodisa, kami dapat memperkenalkan budaya Talaud. Kami juga pernah kolaborasi dengan etnis-etnis lain yang ada di UKSW” (wawancara, 18 November 2024).

Rasa kekeluargaan yang ada menjadikan Porodisa sebagai tempat yang aman untuk berbagi pengalaman dan tantangan, serta sebagai wadah untuk saling membantu dalam studi dan kehidupan sehari-hari, sebelum terjadinya konflik internal yang berdampak besar pada hubungan antar anggotanya.

3.2 Latar Belakang Konflik yang Terjadi

Penulis melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang terjadinya konflik. Dalam wawancara dengan ketua Porodisa yang menjabat sebelum konflik, diungkapkan bahwa, terjadinya penolakan pada perubahan nama, logo, dan AD-ART yang di prakarsai secara sepihak oleh beberapa aktor atau penasehat etnis Porodisa waktu itu. Penolakan dilakukan oleh anggota-anggota senior dengan alasan karena tidak ada diskusi mengenai perubahan dan kurangnya koordinasi dengan semua pihak di Porodisa.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam maka penulis mewawancarai salah satu aktor pencetus perubahan tersebut. Menurut R.A, tujuan utama dari perubahan ini adalah menjadikan Porodisa terlihat lebih modern dan milenial, selain itu, untuk memperjelas cakupan organisasi yang kini hanya berfokus pada Salatiga, mengingat sudah adanya organisasi bagi mahasiswa Talaud di wilayah DIY yaitu Permata (Persaudaraan Mahasiswa Talaud Yogyakarta). R.A juga menyampaikan kekesalannya melalui unggahannya di Facebook terhadap penolakan yang datang dari kelompok lain dalam Porodisa. Ia merasa bahwa banyak anggota yang tidak memberikan kontribusi positif malah merusak hasil karya yang telah dibuat oleh pengurus. Kekecewaan ini mencerminkan sikap defensif yang sering muncul ketika seseorang menghadapi kritik atau penolakan, terutama ketika keputusan dan perubahan yang diusulkan dianggap merupakan pelanggaran terhadap tradisi yang ada.

Penulis melanjutkan wawancara dengan ketua Porodisa periode 2018-2019, dari wawancara ini ditemukan adanya konflik-konflik lain selain masalah penolakan perubahan identitas Porodisa. Bermula di tahun 2019, Porodisa mengadakan Malam Keakraban (Makrab)

sebagai acara tahunan untuk menyambut mahasiswa baru. Dalam acara ini juga diadakan pemilihan ketua baru untuk menggantikan ketua periode sebelumnya. Menjelang Makrab, terdapat dua calon ketua yang diusung oleh dua kubu berbeda (kubu para aktor dan kubu anggota senior). Pada sesi pemilihan, para aktor yang menjabat sebagai panitia memutuskan untuk menetapkan syarat yang ketat mengenai siapa yang memiliki hak suara. Mereka menentukan bahwa hanya anggota Porodisa yang aktif mengikuti semua kegiatan dan ibadah etnis serta mendaftar dalam acara Makrab yang diperbolehkan memberikan suara. Salah satu calon ketua dari kubu yang lain, yang cenderung merasa kehilangan banyak pendukung akibat syarat yang ditetapkan, memutuskan untuk mengundurkan diri dari pencalonan. Dengan demikian, hanya tersisa satu calon tunggal yang merupakan pilihan kubu yang memiliki kekuasaan atas penyelenggaraan pemilihan, kemudian terpilih menjadi ketua Porodisa periode 2019-2020. Menurut O.L (ketua Porodisa 2018-2019):

“saya tidak mendelegasikan mereka membuat syarat-syarat pemilihan, untuk beberapa hal saya sebagai ketua tidak di beri tahu. Mungkin karena usia saya yang masih muda dan kurangnya pengalaman, saya tidak memiliki kekuasaan untuk melampaui para elit-elit tersebut” (wawancara, 23 Oktober 2024).

Dari hasil wawancara terdapat beberapa indikasi jelas mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aktor-aktor senior. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan posisinya untuk memaksakan ide dan gagasan pribadi mereka, tanpa berdiskusi dengan anggota lainnya yang seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan lainnya adalah pembatasan hak suara hanya diberikan kepada anggota yang dianggap 'aktif', yang sebenarnya merupakan cara untuk memfavoritkan calon yang dianggap dekat dengan aktor senior. Dengan cara ini, para aktor dapat mengontrol hasil pemilihan, sehingga mereka hanya mengizinkan calon yang sejalan dengan kepentingan mereka untuk terpilih. Hal ini menciptakan suasana yang tidak adil dan tidak demokratis di dalam organisasi.

Konflik lain juga ditemukan saat penulis mewawancarai salah satu pendiri Porodisa. Menurut K.G, kami memberikan kepercayaan kepada R.A dan A.A untuk mengelola organisasi ini. Kami kenalkan mereka sebagai wajah-wajah Talaud kepada etnis-etnis lain di UKSW, kami didik dengan harapan dapat meneruskan perjuangan kami dalam membangun Porodisa, tetapi mereka malah mengganti identitas Porodisa tanpa berkoordinasi dengan kami, bahkan terdapat informasi yang menyebutkan bahwa mereka kurang mampu merangkul seluruh anggota. Para aktor pencetus perubahan ini ternyata sering membandingkan kondisi mereka, yang saat itu melanjutkan studi ke jenjang S2, dengan anggota lain yang belum menyelesaikan pendidikan S1 tepat waktu. Perlakuan ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung, di mana

eksklusi dan diskriminasi berdasarkan latar belakang pendidikan muncul. Ini tidak hanya merusak integritas struktural Porodisa tetapi juga memicu pembentukan kubu-kubu baru sebagai respons terhadap ketidakpuasan yang mendalam.

Demi meredakan ketegangan yang ada, salah satu pendiri Porodisa ditugaskan untuk melakukan mediasi antara kubu-kubu yang bertikai. Misi ini diemban oleh K.G. Upaya K.G untuk menjelaskan sejarah terbentuknya Porodisa bertujuan agar kedua kubu dapat memahami pentingnya identitas organisasi dan arti kerjasama yang telah dibangun selama ini. Beliau mengungkapkan telah berhasil membujuk para aktor untuk tidak mengganti nama dan sebagainya. Namun, inisiasi mediasi tidak berjalan semulus yang diharapkan. Proses mediasi menjadi ajang meluapkan emosi bagi anggota kubu lainnya. Para anggota terlihat lebih terfokus pada mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan para aktor yang dinilai semena-mena.

Informan lain juga memberikan penjelasan bahwa sebelum perpecahan itu terjadi, terdapat kecurigaan akan transparansi laporan keuangan dana makrab yang tidak jelas. G.M, salah satu anggota, menyatakan:

“Dana makrab saat itu cukup besar, kami meminta laporan pertanggung jawaban kegiatan, tetapi tidak ada. Sehingga salah satu teman saya menyeletuk, ‘jangan membuat organisasi ini tempat bertumbuhnya bibit-bibit koruptor’” (wawancara, 18 Oktober 2022).

Tuduhan mengenai kemungkinan korupsi memperburuk hubungan antara kubu yang berbeda dalam organisasi. Para aktor menyikapi tuduhan tersebut sebagai serangan pribadi, sementara kubu yang merasa terpinggirkan meningkatkan protes terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil tanpa melibatkan mayoritas anggota.

Kedua kubu ini bergantung pada dukungan anggota dan reputasi organisasi di kalangan mahasiswa Talaud. Ketergantungan ini terlihat dari bagaimana mereka berusaha menggalang dukungan untuk legitimasi posisi mereka dalam organisasi.

Puncak konflik terjadi setelah ketidakpuasan terus berlanjut dalam proses mediasi. Kubu aktor memilih untuk meninggalkan tempat mediasi dan mengumpulkan para pengikutnya untuk membentuk organisasi baru bernama Rukun Ana’u Taroda (RUATA). Namun, karena kekhawatiran tentang makna dari nama "RUATA" yang sempat menimbulkan perdebatan, mereka sepakat untuk mengubahnya menjadi Persaudaraan Ana’u Taloda (PERSADA). Pembentukan organisasi baru ini menandai perpecahan yang jelas dan menjadikan dua identitas yang terpisah dalam komunitas mahasiswa Talaud.

3.3 Analisis Konflik Menggunakan Teori Segitiga Konflik

Johan Galtung merupakan salah satu akademisi dan juga pemikir yang berpengaruh terhadap perdamaian dunia. Teori konflik yang populer dari Johan Galtung adalah teori konflik segitiga ABC. Dalam analisis konflik, Johan Galtung membagi tiga komponen utama yang terdiri dari ABC, yang artinya A (*attitude/sikap*), B (*behavior/perilaku*), dan C (*Contradiction/kontradiksi* atau pertentangan). Namun, dalam ketiga komponen tersebut yang menempati urutan pertama dari komponen suatu konflik yaitu bermula dari kontradiksi (C): Merujuk pada masalah atau kepentingan yang bertentangan antara pihak-pihak yang berkonflik. Mengidentifikasi akar penyebab konflik adalah langkah pertama dalam resolusi; Sikap (A): Mencakup persepsi, prasangka, dan sikap emosional masing-masing pihak terhadap satu sama lain. Mengubah sikap dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk dialog; Perilaku (B): Berkaitan dengan tindakan nyata yang diambil oleh pihak-pihak dalam konflik, termasuk kekerasan atau negosiasi. Perilaku ini dapat diubah melalui mediasi atau negosiasi (Azisi, 2021). Dalam Webe and Galtung (2007), Galtung menyatakan pendapatnya bahwasanya urutan konflik sebagaimana di atas: C—A—B, pada mulanya konflik muncul secara objektif dari pihak tertentu, menemukan sesuatu dari luar, kehidupan sikap, mengambil bagian dalam pelaku konflik, ekspresi perilaku, baik itu secara fisik maupun lisan, dengan kekerasan ataupun non-kekerasan.

Dalam konteks konflik yang terjadi antara Porodisa dan PERSADA, analisis dengan menggunakan segitiga teori konflik Galtung menjadi sangat relevan. Konflik ini berawal dari **kontradiksi** (C) yang muncul akibat perbedaan kepentingan dan tujuan antara anggota kubuh aktor senior yang ingin menerapkan perubahan dan anggota senior lainnya yang menolak perubahan tersebut. Para aktor senior menganggap bahwa penggantian nama dan logo akan memperbarui dan memperkuat keberlangsungan organisasi, sementara anggota lain merasa bahwa perubahan ini akan menghilangkan warisan budaya yang telah terbangun. Selain itu, kebijakan pemilihan ketua yang eksklusif menciptakan situasi di mana suara banyak pihak diabaikan. Ketidakpuasan ini kemudian memicu **sikap** (A) yang negatif dari pihak yang menolak, yang merasa terpinggirkan dan dianggap tidak berhak dalam pengambilan keputusan, serta munculnya prasangka terhadap niat aktor. Anggota senior menilai para aktor berusaha menguasai organisasi tanpa memperhatikan klarifikasi dan masukan dari anggota lainnya, sehingga merusak saling percaya dan komunikasi yang seharusnya ada dalam organisasi. Dalam situasi ini, sikap defensif dan ketidakpuasan yang semakin menguat terlihat dalam interaksi mereka. Akibatnya, **perilaku** (B) yang diambil oleh masing-masing pihak menjadi semakin agresif, muncul gerakan protes, serta ketidaknyamanan dalam komunikasi yang jelas, yang

berujung pada situasi yang menimbulkan ketegangan dan perpecahan hingga terbentuknya PERSADA.

Teori Segitiga Konflik Galtung memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami dinamika yang terjadi di Porodisa. Baik sikap yang kontradiktif, perilaku yang defensif, dan kontradiksi mendalam mengenai identitas organisasi dan kepemimpinan, semuanya berkontribusi pada ketegangan yang telah menyebabkan perpecahan antara Porodisa dan PERSADA. Penting untuk mengatasi masalah ini dengan komunikasi yang transparan dan inklusif, agar semua pihak dapat merasakan kehadiran mereka dalam pengambilan keputusan serta menjaga kebersamaan dalam komunitas.

3.4 Pasca konflik dan Dinamika Hubungan Etnis

Pasca konflik, Porodisa dan PERSADA kini berjalan sebagai dua entitas yang terpisah, masing-masing dengan anggota yang setia. Porodisa tetap menyelenggarakan acara-acara kebudayaan dan memperkenalkan warisan budaya Talaud, sedangkan PERSADA lebih fokus pada partisipasi dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus. Dinamika hubungan antara Porodisa dan PERSADA pada tahun 2024 menunjukkan upaya untuk menjalin kembali interaksi meskipun ada batasan yang diberlakukan oleh para pembina PERSADA. Seperti wawancara dengan ketua PERSADA periode 2024, menurut D.B:

“saya ingin membangun kembali kerukunan dan solidaritas anak Talaud yang dulu sempat retak. Saya ingin kita sebagai orang Talaud sadar dulu akan identitas kita, meski berada di organisasi yang terpisah kita tetap memperkuat tali persaudaraan. Karena saya sudah merasakan betapa tidak enakny kalau tidak hidup dalam kondisi seperti ini terus. Tetapi untuk mewujudkan itu semua memang butuh waktu karena masih terdapat perbedaan pendapat antara saya dan beberapa Pembina” (wawancara, 30 November 2024).

Wawancara juga dilakukan dengan ketua Porodisa, Menurut R.E:

“beberapa upaya telah saya lakukan untuk mengajak anggota persada dalam kegiatan IICF dan Celebes, namun Pembina PERSADA mempermasalahkan soal nama yang dipakai, Jika ingin kolaborasi maka nama yang di pakai tidak boleh menonjolkan salah satu organisasi. Tetapi saya meyakini pelan-pelan PERSADA bisa gabung lagi dengan Porodisa” (wawancara 20 November 2024).

Hasil wawancara dengan kedua belah pihak, adanya kemajuan menuju rekonsiliasi meskipun masih menghadapi banyak tantangan. Persepsi positif ini menunjukkan bahwa kedua organisasi tersebut mungkin bisa menemukan cara untuk bekerja sama di masa depan. Keduanya memiliki keinginan untuk bersatu dan kembali ke semangat gotong royong.

3.5 Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah usaha menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan membangun hubungan yang baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru (Suhardono, 2015). Galtung, sebagai salah satu tokoh dalam studi konflik, menekankan pentingnya mediasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan konstruktif. Karya Johan Galtung dalam "Conflict and Peace: A Typology" mengeksplorasi sifat kompleks konflik dan perdamaian, memperkenalkan kerangka komprehensif untuk memahami kekerasan dan implikasinya terhadap keharmonisan masyarakat. Galtung, pelopor studi perdamaian, mengkategorikan kekerasan menjadi tiga jenis utama: (1) *direct violence* (kekerasan langsung), seperti kekerasan fisik; (2) *structural violence* (kekerasan struktural) bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suatu struktur sosial seperti pemerintah atau organisasi yang berkuasa lalu merugikan masyarakat dengan cara mendiskriminasi dan sebagainya; and (3) *cultural violence* (kekerasan kultural), yaitu bentuk kekerasan yang melegitimasi kekerasan disebabkan anggapan bahwa kelompok lain seperti suku, ras, dan agama lebih rendah (Galtung, 2019).

Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam konteks konflik di Porodisa sangat berkaitan dengan konsep kekerasan struktural yang dijelaskan oleh Johan Galtung. Ketika aktor-aktor senior menggunakan posisi mereka untuk memaksakan ide dan gagasan pribadi tanpa melibatkan suara dari anggota lainnya, maka ini menciptakan struktur yang tidak adil di dalam organisasi. Pembatasan hak suara yang hanya diberikan kepada anggota yang dianggap 'aktif' merupakan contoh nyata dari kekerasan struktural, dimana beberapa individu mengontrol akses terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dengan mendefinisikan siapa yang 'aktif' dan berhak memberikan suara, para aktor senior dapat memanipulasi proses pemilihan untuk memastikan bahwa calon yang terpilih pro terhadap kepentingan mereka. Hal ini memperdalam ketidakpuasan di antara anggota yang merasa terpinggirkan, yang pada gilirannya dapat memicu reaksi negatif, memperkuat perpecahan dan menciptakan suasana yang tidak demokratis. Dinamika ini mendorong terjadinya konflik yang lebih besar, karena anggota yang merasa setidaknya kehilangan hak mereka dalam organisasi akan melakukan perlawanan, baik secara verbal maupun dalam bentuk pengunduran diri dari proses yang ada. Jadi, penyalahgunaan kekuasaan di sini tidak hanya merupakan masalah etika, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya kondisi yang bersifat eksklusif dan tidak adil dalam struktur organisasi Porodisa.

Ada 3 (tiga) jenis pendekatan dalam resolusi konflik dari Galtung: (1) *Peacekeeping*: Menghentikan kekerasan melalui intervensi netral; (2) *Peacemaking*: Mengakhiri kekerasan dengan menjembatani komunikasi antara pihak-pihak berkonflik; dan (3) *Peacebuilding*:

Membangun struktur sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung perdamaian jangka panjang (Galtung, 2019).

Dalam konteks konflik yang terjadi di Porodisa, pendekatan *peacemaking* atau perdamaian menjadi pilihan yang paling tepat untuk diterapkan. Pendekatan ini sangat penting karena fokusnya adalah pada menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, yaitu antara aktor-aktor senior dan anggota yang merasa terpinggirkan.

Untuk mengimplementasikan pendekatan *peacemaking* ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, perlu membentuk tim mediator yang netral. Mediator ini berfungsi untuk membantu mengarahkan diskusi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya, mengadakan forum diskusi secara reguler di mana setiap anggota Porodisa bisa menyampaikan pandangan mengenai perubahan yang ada, serta mengungkapkan kekhawatiran dan harapan mereka untuk masa depan organisasi.

Penting juga untuk membangun kesepakatan bersama dalam diskusi tersebut. Kesepakatan ini harus disetujui oleh semua pihak agar dapat meningkatkan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Selain itu, mengadakan pelatihan dan workshop tentang komunikasi efektif dan resolusi konflik sangat bermanfaat untuk membantu anggota berlatih berkomunikasi secara konstruktif, serta membekali mereka dengan alat yang diperlukan untuk menangani konflik di masa mendatang.

Dengan menerapkan pendekatan *peacemaking*, Porodisa memiliki potensi untuk mengatasi konflik internal dengan cara yang lebih terstruktur dan konstruktif. Selain meredakan ketegangan yang ada, pendekatan ini dapat membangun hubungan yang lebih positif di antara anggota, sekaligus mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. *Peacemaking* tidak hanya menjadi solusi efektif untuk menciptakan harmoni di antara anggota, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan Porodisa ke depan, menjadikannya sebuah organisasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua anggotanya.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis konflik yang terjadi di Porodisa dan perpecahan yang muncul menjadi PERSADA, beberapa hal penting dapat disimpulkan. Pertama, kondisi awal Porodisa sebagai paguyuban mahasiswa asal Kabupaten Talaud menunjukkan semangat kebersamaan yang kuat, dimana anggota-anggotanya aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budaya dan sosial. Hal ini menciptakan rasa kekeluargaan yang solid, sehingga Porodisa dianggap sebagai rumah bagi mahasiswa Talaud di perantauan. Kedua, latar belakang konflik yang terjadi dapat ditelusuri dari berbagai faktor, seperti penolakan terhadap perubahan nama dan logo, serta pemilihan ketua yang dianggap

tidak adil. Situasi ini semakin rumit dengan adanya tuduhan mengenai transparansi keuangan dan keputusan yang diambil tanpa melibatkan banyak suara. Hal ini menciptakan suasana yang tidak kondusif dan berujung pada perpecahan. Ketiga, dinamika hubungan antara kedua kubu pasca-konflik menunjukkan bahwa walaupun Porodisa dan PERSADA berjalan sebagai entitas yang terpisah, terdapat keinginan untuk membangun kembali hubungan dan menjalin kerukunan. Upaya kolaborasi antara kedua organisasi ini masih dibayangi tantangan, terutama terkait identitas dan perbedaan yang ada, namun menunjukkan tanda-tanda positif ke arah rekonsiliasi. Keempat, Pendekatan *peacemaking* menjadi langkah strategis dalam resolusi konflik, dengan fokus pada pentingnya komunikasi terbuka dan inklusif dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan keharmonisan dalam sebuah organisasi sangat bergantung pada kemampuan untuk mendengarkan aspirasi tiap anggota, serta membangun struktur yang adil dan demokratis.

Dengan demikian, pengalaman Porodisa mengajarkan kita bahwa menjaga kesatuan dalam komunitas membutuhkan kepekaan terhadap kebutuhan bersama dan komitmen untuk berkolaborasi, demi menghadirkan sebuah organisasi yang lebih kuat dan kompak di masa depan. Akhirnya, konflik yang terjadi di Porodisa dan pembentukannya menjadi PERSADA menggarisbawahi pentingnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan perlunya komunikasi yang transparan dalam sebuah organisasi. Pemeliharaan identitas bersama dan keterlibatan semua anggota memiliki potensi untuk membawa pembangunan organisasi ke arah yang lebih inklusif dan demokratis. Hal ini tidak hanya akan memperkuat ikatan komunitas tetapi juga memberikan landasan yang kokoh bagi keberlangsungan kelompok di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mursyid Azisi. (2021). STUDI KOMPARATIF TEORI KONFLIK JOHAN GALTUNG DAN LEWIS A. COSER. *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 07 No.2, 220–229.
- Burlian, P. (2015). *patologi sosial* (R. Damayanti, Ed.). PT. Bumi Aksara.
- Galtung, J. (2019). Conflict and Peace: A Typology. *International Journal of Conflict and Violence*.
- Irwandi, & Endah R. Chotim. (2017). ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol.7 no 2, 24–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414>
- La Ode Manarta, Muhammad Aris, Arditya Prayogi, Hartini Amin, Andi Tenri, Kufli Muak Hara, Kartika Sari, Tesaannisa, La Ode Abdul Munafi, & Wa Ode Rohmiati Mandati. (2024). *TEORI SOSIOLOGI* (Hamidin Rasulu & Waode Munaeni, Eds.). CV. EUREKA MEDIA AKSARA. <https://www.researchgate.net/publication/378857226>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saljana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Nour Zattullah. (2021). KONFLIK SUNNI-SYIAH DI SAMPANG DITINJAU DARI TEORI SEGITIGA KONFLIK JOHAN GALTUNG. 86 | *JURNAL ILMU BUDAYA*, 9(1).
<https://worldpopulationreview.com/country->
- Novri Susan, M. A. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik* (Edisi Revisi). Kencana (Divisi dari PRENADAMEDIA Group).
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (Vol. 1). Cakra Books.
- Semuel Joni, Ririn Todingan Tiku Limbong, & Marianti Pabia. (2023). Analisis Konflik Dan Resolusinya Terhadap Perpecahan Jemaat Gereja Beth-El Tabernakel Tariwan di Lembang Pali-orong Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja. *Kamarampasan: Jurnal Mahasiswa Kepemimpinan Kristen*, VOL 1.NO.1, 83–100.
- Setiadi, M. E. (2018). *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial (Teori,Aplikasi, dan Pemecahannya)* (edisi pertama). Kencana 2020.
- Suhardono, W. (2015). *KONFLIK DAN RESOLUSI **. <https://www.academia.edu/15116981>
- Y. Sigit Widiyanto, & Made Pum. (1999). *KEBERADAAN PAGUYUBAN-PAGUYUBAN ETNIS DI DAERAH PERANTAUAN DALAM MENUNJANG PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN : (Kasus Ikatan Keluarga Minang Saiyo di Denpasar Bali, paguyuban Etnis)* (Mc. Suprapti, Ed.; edisi 1999). CV BIMA SAKTI RAYA.
- Yogi Prana Izza, Lc. , M. (2020). TEORI KONFLIK DIALEKTIKA RALF DAHRENDORF. *Jurnal Studi Keislaman*, 9(1).